



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

**JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 1 – MEDAN SATRIA
KOTA BEKASI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP	33
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP	35
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP	48
BAB V PENUTUP	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD	5
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra.....	12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan)	13
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi.....	24
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	34
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025.....	37
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	39
Tabel 3.4 Jumlah Aparatur Satpol PP Kota Bekasi.....	47
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025	50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1, Nomor 11, menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya pada Pasal 7, Ayat (2) dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Penyusunan Renja-SKPD diatur dengan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, Pasal 273, Ayat (3) dan Ayat (4). Penyajian Dokumen Renja-SKPD selanjutnya diatur pada **Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Halaman 400-408. Tata cara perencanaan pembangunan daerah dan tata cara perubahan rencana pembangunan derah dan rencana perangkat daerah di Kota Bekasi diatur dengan **Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah**. Selanjutnya pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh diatur dengan

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 yang disusun memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2024-2026. Untuk itu penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, setiap SKPD juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPD

Salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu **ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat** diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diatur dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Pada Pasal 3 diatur bahwa Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI TAHUN 2025 disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

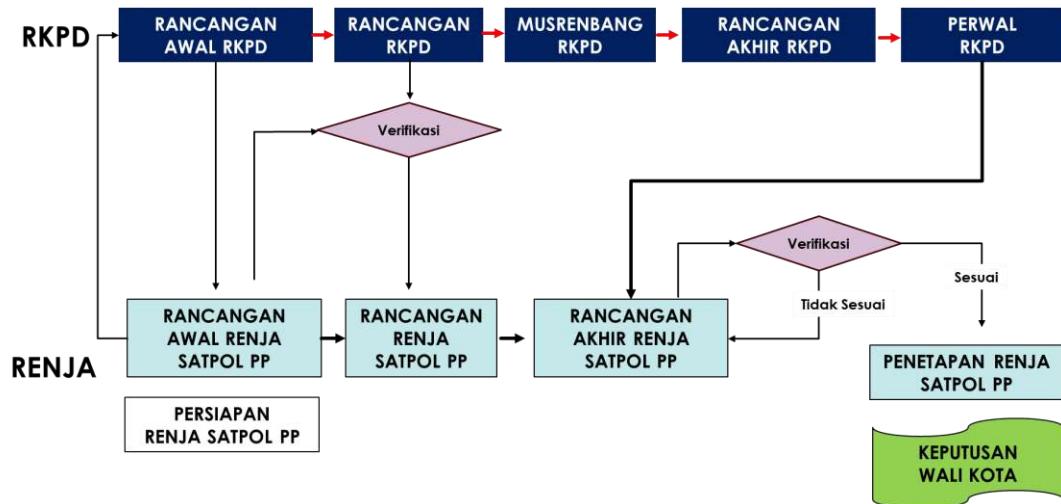
1. Penyusunan Rancangan Awal Renja SATPOL PP Kota Bekasi berpedoman pada Renstra SATPOL PP Kota Bekasi, hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan.
2. Rancangan Awal Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025 dimasukkan ke dalam SIPD dan disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.
3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan:
 - a. rancangan Renja seluruh perangkat daerah yang didalamnya termasuk aspirasi masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan (melalui Musrenbang) yang telah diverifikasi serta penelaahan atas pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD; dan

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- b. hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
4. Penyusunan Rancangan **Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025** merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Penyusunan Rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025 adalah proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan:
- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - b. hasil usulan aspirasi masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan yang telah diverifikasi; dan
 - c. hasil penelaahan atas pokok-pokok pikiran reses DPRD.
6. Rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025 dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
7. Proses penyempurnaan rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025.
8. Perumusan **Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025** dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu SATPOL PP Kota Bekasi berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.
9. Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2025 disampaikan Kepala SATPOL PP Kota Bekasi kepada Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi untuk diverifikasi.
10. BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir renja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 1.1.

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
32. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
33. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
35. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024; dan
36. Peraturan Walikota Bekasi No 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bekasi.

B. Tujuan

- 1) Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satpol PP yang telah disusun sebelumnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan;

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2) Menciptakan sinergitas Perencanaan secara Berkesinambungan antara berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan .
- 3) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- 4) Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025;
- 5) dan Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.4 Sistematika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauh mana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Satpol PP Kota Bekasi memiliki 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
2. Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Satpol PP Kota Bekasi tahun 2024 melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.729.202.411	43.364.410.324	92.80
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.972.260.159	45.639.200.943	91.33
JUMLAH	96.701.462.570	89.003.611.267	92.4

Berdasarkan tabel diatas, Satpol PP Kota Bekasi menganggarkan sebesar Rp. **96.701.462.570** dengan realisasi sebesar Rp. **89.003.611.267** atau sebesar **92.4 %**. Adapun selanjutnya hasil evaluasi kinerja tahun 2024 jika dikaitkan dengan target pencapaian Renstra Satpol PP tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2024, sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI:	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TABEL 2.2
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan)**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) (10/4)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024 Orang/bulan	3132 Orang/Bulan 2784 Orang/Bulan	231 Orang/bulan	231 Orang/bulan	100%	3024 Orang/bulan	3024 Orang/bulan	100%
2,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	4 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

3,1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14 Unit	-	-	-	100%	14 Unit	14 Unit	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%
4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1307 Unit	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4,2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9760 unit	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4,3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	292 Unit 161003 Lembar	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4,4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	200 Buku/exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87 Kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		-	-	100%	100 %	100 %	100%
5,1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	6 Unit	-	-	100%	25 Unit	25 Unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				100%	100 %	100 %	100%
6,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84 Rek/Bulan	803 Laporan	803 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120 Orang/Bulan 6216 Orang/Bulan	506 Orang	506 Orang	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %				100%	100 %	100 %	100%
7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

7,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	54 Unit	52 Unit	52 Unit	100%	57 Unit	57 Unit	100%
7,3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	-	-	-	100%	5 Unit	5 Unit	100%
7,4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	-	-	-	100%	30 Unit	30 Unit	100%
7,5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6 Unit	112 Unit	112 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
7,6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada Rasio Linmas di Tiap Kelurahan	100 1 : 31 % Anggota/Kelu rahan				100%	100 1 : 31 % Anggota/Ke lurahan	100 1 : 31 % Anggota/Kelu rahan	100%
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100 %				100%	100 %	100 %	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1,1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	14 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1,2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1,3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	581 Orang	606 Orang	310 Orang	310 Orang	100%	581 Orang	581 Orang	100%
1,4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

1,5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	250 laporan	15 Kali 23 Hari 42 Keg	116 Kasus	116 Kasus	100%	250 laporan	250 laporan	100%
1,6	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	254 Laporan	36 Kali 145 Kali	163 Kasus	163 Kasus	100%	254 Laporan	254 Laporan	100%
1,7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1,8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	895 Unit	42 Unit	665 Unit	665 Unit	100%	895 Unit	895 Unit	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100 %				100%	100 %	100 %	100%
2,1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2,2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2,3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator Program sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, dari 9 (sembilan) Indikator Program seluruhnya dapat mencapai target.

Adapun faktor keberhasilannya adalah :

1. Adanya Komitmen tim penyusunan dokumen perencanaan dan tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detail/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya; serta
3. dilaksanakannya monitoring secara berkala terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan Fungsi dan tugas Satpol PP Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Satpol PP Kota Bekasi.

Pada tahun 2024, Satpol PP Kota Bekasi memiliki 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu : (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah (2) Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat, dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi indikator kinerja utama (IKU).

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31	1 : 31
		Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	100%	89,42%	Tercapai
		Nilai AKIP	Nilai	B	B	Tercapai
		SPM	%	60%	56,90%	Tercapai

Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi telah dianalisis capaian kinerja baik itu IKU maupun IKK. Dari hasil capaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dihadapi antara lain :

1. Masih tingginya kasus penyelenggaraan perda oleh masyarakat
2. Masih kurang dan belum optimalnya personil linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
4. Belum optimalnya manajemen kinerja organisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Isu penting yang dihadapi Satpol PP Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

1. Untuk itu akan diadakan sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada di Satpol PP Kota Bekasi
2. Akan diadakan pengawasan dalam penegakan perda
3. Penguatan terhadap kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan tingkat kota.
4. Melakukan pembinaan terhadap personil linmas
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi dan belum terbangunnya pola budaya kinerja pada setiap level organisasi .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan Serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi skpd dalam menyempurnakan renja skpd untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Persandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD terlihat pada tabel sebagai berikut

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	47.319.202.411,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	46.729.202.411,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	45.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	45.000.000,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen	35.000.000,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00 Laporan	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	37.679.186.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	36.929.186.000,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.024,00 Orang/Bulan	37.669.186.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.024,00 Orang/Bulan	36.919.186.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00 Laporan	10.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur	100%	104.174.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur	100%	104.174.000,00
3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14,00 Unit	104.174.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14,00 Unit	104.174.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.066.753.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.066.753.000,00
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	75.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	75.000.000,00
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	302.832.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	302.832.000,00
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	83.921.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	83.921.000,00
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	30.000.000,00
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	100.000.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	475.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	475.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	194.957.251,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	211.175.251,00
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25,00 Unit	194.957.251,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25,00 Unit	211.175.251,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.784.432.160,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.784.432.160,00
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	950.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	950.000.000,00
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	4.834.432.160,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	4.834.432.160,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.444.700.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.588.482.000,00
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	285.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	385.000.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57,00 Unit	1.499.700.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57,00 Unit	1.499.700.000,00
7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5,00 Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5,00 Unit	10.000.000,00
7.4	Pemeliharaan Mebel	Kota Bekasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30,00 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Bekasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30,00 Unit	50.000.000,00
7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00 Unit	200.000.000,00
7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	400.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	443.782.000,00
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	100,00%	49.972.260.159,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	100,00%	49.972.260.159,00
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	49.221.475.159,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	49.221.475.159,00

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
 [Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	550.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	550.000.000,00
1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,00 Dokumen	14.391.000.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,00 Dokumen	14.391.000.000,00
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Bekasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	581,00 Orang	600.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Bekasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	581,00 Orang	600.000.000,00
1.4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4,00 Dokumen	1.909.707.080,00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4,00 Dokumen	1.909.707.080,00

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
1.5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	250,00 Laporan	7.031.496.000,00	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	250,00 Laporan	7.031.496.000,00
1.6	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	254,00 Laporan	24.214.142.080,00	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	254,00 Laporan	24.214.142.080,00
1.7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1,00 Laporan	137.093.250,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1,00 Laporan	137.093.250,00

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
1.8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	895,00 Unit	388.036.749,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	895,00 Unit	388.036.749,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bekasi	Prosentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	100%	750.785.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bekasi	Prosentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	100%	750.785.000,00
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1,00 Laporan	147.350.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1,00 Laporan	147.350.000,00
2.2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12,00 Laporan	162.450.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12,00 Laporan	162.450.000,00
2.3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12,00 Laporan	440.985.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12,00 Laporan	440.985.000,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				97.291.462.570	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				96.701.462.570

Arah pembangunan Kota Bekasi tahun 2025 menekankan pada pencapaian target atas sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan dalam Visi dan Misi Wali Wali Kota Terpilih sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berharap menjadi Dinas yang diperhitungkan dengan permasalahan yang sangat mendasar di dalam menciptakan, memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan alasan yang kuat antara lain :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Masih tingginya unjuk rasa di Kota Bekasi
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
6. Semakin menjamurnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, di wilayah Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang serius terutama penanganan pasca dilakukan penertiban atau operasi.
7. Permasalahan di daerah perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.
8. Daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial karena heterogenitas masyarakat Kota Bekasi yang mayoritas bukan penduduk tetap;
9. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
10. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
11. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejalan dengan perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam hal ini merupakan aspirasi langsung yang disampaikan dari masyarakat sebagai *stakeholder* yang disampaikan melalui forum musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan. Usulan program dan kegiatan tersebut kemudian direkapitulasi dan dianalisa kembali oleh perangkat daerah dalam hal ini SKPD terkait dalam hal urgensi pelaksanaan, kesesuaian terhadap tupoksi SKPD dan ketersediaan anggaran. Hasil pengolahan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan proses tolak dan terima.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No.	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/KE L
189	1065965	Pengadaaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	[LPM] jl. Raya Kampung sawah seringkali menjadi lokasi tawuran remaja dan beberapa tindak kriminal beberapa waktu yang lalu di tahun 2023, kondisi ini yang menjadi faktor keamanan lingkungan menjadi tidak kondusif dan mengkhawatirkan, oleh sebab itu maka diperlukannya perangkat pengawasan jalan berupa kamera CCTV di titik-titik rawan sepanjang Jl. Raya Kampung Sawah RW.003 & RW.004 Kelurahan Jatimelati	Jl. Raya Kampung Sawah RW.003 & RW.004 Kelurahan Jatimelati Anggaran ± Rp. 347.000.000 Kota Bekasi	Pondok Melati	Kelurahan Jatimelati

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD kota Bekasi 2024- 2026 akan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterkaitan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di samping itu, perlu ditelaah Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu -isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional,

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dilakukan juga penelaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdiri dari 5 (lima) Tujuan dan 11 (sebelas) Sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN RANCANGAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RANCANGAN RPD KOTA BEKASI 2024-2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah</p> <p>2. Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah</p>
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	<p>1. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi</p> <p>2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat</p> <p>3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender</p> <p>4. Meningkatnya tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat kota</p>
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	<p>1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat</p> <p>2. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana</p>
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	<p>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa, dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi</p> <p>2. Meningkatnya daya beli masyarakat</p>

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Ditinjau dari tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, tujuan yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi tujuan keempat yaitu "**terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman**" dengan sasaran pertama yaitu "**meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat**".

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024- 2026, Satpol PP Kota Bekasi memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

Tujuan 1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator tujuan 1	Persentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada
Tujuan 2	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator tujuan 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah :

Sasaran 1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator Sasaran 1	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Persentase penegakan pelanggaran perda
	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan

b. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut :

Sasaran 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator Sasaran 2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja seperti tergambar pada tabel berikut ini.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN
				2025
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100
			Prosentase penegakan perda	100
			Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31
2	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
			SPM	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Pada tahun 2024-2026, Satpol PP Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

Secara rinci berikut adalah program dan kegiatan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 serta prakiraan maju 2026.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kota Bekasi	100 %	82.713.450.660	APBD Kota Bekasi	100 %	106.139.363.427	APBD Kota Bekasi
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	160.000.000		100 %	310.000.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	2 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kota Bekasi	10 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

39

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	46.799.112.000		100 %	91.559.519.657	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Kota Bekasi	224 Orang/bulan	46.789.112.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224 Orang/bulan	91.549.519.657	PENDAPATA N ASLI DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Kota Bekasi	18 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	2.920.224.000		100 %	1.500.000.000	
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Kota Bekasi	15 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15 Unit	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kota Bekasi	1 Paket	2.620.224.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	1.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kota Bekasi	45 Orang	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58 Orang	500.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	1.538.886.800		100 %	1.844.538.770	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	1 Paket	44.348.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	5 Paket	325.723.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	325.723.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	4 Paket	565.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	565.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kota Bekasi	3 Paket	132.963.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	132.963.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD								300.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	340.196.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	340.196.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	1.176.305.000		100 %	1.176.305.000	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Bekasi	45 Unit	1.176.305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 Unit	1.176.305.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	26.438.918.560		100 %	1.400.000.000	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.240.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.400.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	25.198.718.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen (%)	Kota Bekasi	100 %	3.680.004.300		100 %	8.349.000.000	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Bekasi	6 Unit	281.004.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kota Bekasi	58 Unit	1.700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58 Unit	1.800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kota Bekasi	30 Unit	699.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	699.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kota Bekasi	1 Unit	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	5.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	37.412.455.480	APBD Kota Bekasi	-	28.111.330.180	APBD Kota Bekasi
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Kota Bekasi	-	36.683.100.480		-	27.052.080.180	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	938.805.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21.082.706.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	15.791.926.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	1.055.188.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.833.831.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	593.250.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116 laporan	2.325.252.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116 laporan	1.944.100.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.625.218.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	5.625.218.080	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	103.593.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	103.593.100	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Kota Bekasi, Medan Satria, Harapan Mulya	15 Unit	4.772.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	1.000.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	Kota Bekasi	-	729.355.000		-	1.059.250.000	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kota Bekasi, Medan Satria, Harapan Mulya	1 Laporan	147.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	457.900.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	311.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	321.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	270.285.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	280.350.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL						Rp120.125.906.140			Rp133.311.888.608	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Satpol PP Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 686 orang aparatur yang terdiri dari :

Tabel 3.4
Jumlah Aparatur Satpol PP Kota Bekasi

URAIAN	JUMLAH
GOL IV	8
GOL III	91
GOL II	94
GOL I	6
JUMLAH PNS	199
JUMLAH TKK	487
TOTAL	686

Sumber : subbagian umum dan kepegawaian satpol pp kota bekasi

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 Satpol PP Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Berikut program yang dilaksanakan tahun 2024 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur Satpol PP Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan Satpol PP yang berkualitas, serta untuk mewujudkan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas Satpol PP Kota Bekasi yang akuntabel

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;

4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
5. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Satpol PP guna melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bekasi memiliki rencana kerja tahun 2025 hasil desk dengan total pagu sebesar Rp.**120.125.906.140,-** dengan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana
1					Satuan Polisi Pamong Praja				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp120.125.906.140	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			82.713.450.660	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			160.000.000	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

51

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		2.620.224.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.538.886.800	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		44.348.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		325.723.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		565.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		132.963.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		340.196.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.176.305.000	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1.176.305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.438.918.560	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		1.240.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		25.198.718.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.680.004.300	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		281.004.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit		1.700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	699.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		37.412.455.480		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		36.683.100.480		
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	450.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		21.082.706.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Orang		490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen		1.833.831.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	116 laporan	2.325.252.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	5.625.218.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	103.593.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 Unit	4.772.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			729.355.000	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	147.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			,	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		311.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		270.285.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL								Rp120.125.906.140	

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Akhir Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Satpol PP kota Bekasi Tahun 2024-2026 Dan Mengacu Pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi para stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bekasi. Ruang lingkup perencanaan penegakan Perda dan menciptakan ketertiban serta keamanan di Kota Bekasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

Adapun kaidah pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bidang, sub bidang dan sub bagian pada Satpol PP Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Satpol PP Kota Bekasi tahun 2025 dengan Sebaik-baik nya;
3. Program-program yang tercantum dalam Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan anggaran;
4. Agar Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Satpol PP Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran *Stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat

PARAF KOORDINASI :	
Kepala SATPOL PP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Rencana tindak lanjut Satpol PP Kota Bekasi Pada Tahun 2025 akan melaksanakan :

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
2. Pelaksanaan Musrembang
3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
4. Pembinaan dan pemanfaatan Data dan informasi SKPD
5. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas upaya penyeragaman dan penyamaan persepsi melalui komunikasi, koordinasi dan konsolidasi internal mutlak diperlukan sehingga pencapaian target kinerja bukan hanya tanggung jawab Kepala SKPD selaku pimpinan satpol PP melainkan seluruh jajaran pemangku jabatan di setiap bidang beserta staf yang ada dibawahnya.

Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis serta sejalan dengan tugas dan fungsi. Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Satpol PP yang melaksanakan program dan kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Satpol PP Kota Bekasi tahun berikutnya.

Segala kekurangan diharapkan selalu menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk selanjutnya bisa mencapai hasil yang maksimal.

Bekasi, 9 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BEKASI



KARTO, S.I.P, M.SI
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670415 198603 1 005